



## Peran Gereja dalam Pemerintahan Sejarah Tentang Agama Kristen

Jeni Murni Gulo\*<sup>1</sup>, Arismawati Halawa<sup>2</sup>, Malik Bambang<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Theologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta, Indonesia

[jenimurni@gmail.com](mailto:jenimurni@gmail.com)<sup>1</sup>, [arismawatyhlw@gmail.com](mailto:arismawatyhlw@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Kb. Besar, RT.001/RW.002, Kb. Besar, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Banten 151222

Korespondensi penulis : [jenimurni@gmail.com](mailto:jenimurni@gmail.com)\*

**Abstract:** *This Abstract Outlines The Historical Role Of The Christian Church In Governance, Especially In The Western World. From Its Early Development, The Church Wielded Considerable Influence Over Social And Political Affairs, Particularly After Christianity Became The Official Religion Of The Roman Empire In The 4th Century. Beyond Its Religious Duties, The Church Served As A Powerful Social, Moral, And Legal Authority In Medieval Europe. Through Canon Law, It Governed Various Facets Of Societal Life, Including Marriage, Inheritance, And Social Norms, And Validated The Power Of Rulers Through The "Divine Right" Doctrine. However, The Protestant Reformation Of The 16th Century Marked A Major Shift, Promoting A Separation Of Church And State That Influenced The Rise Of Secular Governance Systems. The Protestant Church Championed Religious Freedom And Individual Autonomy, Foundations For Modern Pluralism And Democracy. In The Contemporary Era, While The Church's Formal Governance Role Has Declined, It Remains A Moral Voice, Particularly On Social Issues, Justice, And Human Rights. This Study Concludes That The Church's Role In Governance Has Evolved From A Political And Legal Authority To A More Inclusive Moral And Social Role In A Progressively Secular Society.*

**Keywords:** *Influence of the Church in Politics, History of Christianity and Government, Relations between Religion and State*

**Abstrak:** Menguraikan Peran Gereja Kristen Dalam Pemerintahan Sepanjang Sejarah, Khususnya Di Dunia Barat. Sejak Awal Kemunculannya, Gereja Kristen Telah Memiliki Pengaruh Besar Dalam Bidang Sosial Dan Politik, Terutama Setelah Kekristenan Diakui Sebagai Agama Resmi Kekaisaran Romawi Pada Abad Ke-4. Gereja Berfungsi Tidak Hanya Sebagai Institusi Keagamaan, Tetapi Juga Sebagai Otoritas Sosial, Moral, Dan Hukum Yang Sangat Berpengaruh Di Eropa Pada Abad Pertengahan. Melalui Hukum Kanon, Gereja Mengatur Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat, Seperti Pernikahan, Warisan, Dan Norma Sosial, Serta Memberikan Legitimasi Bagi Kekuasaan Penguasa Melalui Konsep "Hak Ilahi." Namun, Reformasi Protestan Pada Abad Ke-16 Membawa Perubahan Besar Dengan Munculnya Pemisahan Antara Kekuasaan Gereja Dan Negara, Yang Kemudian Menginspirasi Sistem Pemerintahan Sekuler. Gereja Protestan Baru Mendorong Kebebasan Beragama Dan Otonomi Individu, Yang Menjadi Fondasi Bagi Pluralisme Dan Demokrasi Modern. Di Era Modern, Meskipun Peran Formal Gereja Dalam Pemerintahan Telah Berkurang, Gereja Tetap Menjadi Suara Moral Dalam Isu-Isu Sosial, Keadilan, Dan Hak Asasi Manusia. Studi Ini Menyimpulkan Bahwa Peran Gereja Kristen Dalam Pemerintahan Telah Berkembang Dari Kekuatan Politik Dan Hukum Menjadi Peran Moral Dan Sosial Yang Lebih Inklusif Di Tengah Masyarakat Yang Semakin Sekuler.

**Kata Kunci:** Pengaruh Gereja dalam Politik, Sejarah Kekristenan dan Pemerintahan, Relasi Agama dan Negara

### 1. PENDAHULUAN

Sejarah gereja menunjukkan peran pentingnya dalam perkembangan agama kristen serta dalam masyarakat di sekitarnya, baik dalam aspek spiritual, politik, maupun sosial. Hubungan gereja dengan pemerintah telah berkembang seiring waktu, mulai dari masa-masa awal ketika umat kristen mengalami penganiayaan, hingga periode di mana gereja menjadi sangat berpengaruh dalam struktur kekuasaan negara dan bahkan menentukan kebijakan pemerintahan. Gereja berusaha menguatkan ajarannya di tengah masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai dan kepercayaan romawi kuno pada awal penyebaran agama kristen. Pengaruh

gereja semakin besar, termasuk dalam pemerintahan, setelah kaisar konstantinus melegalkan agama kristen pada abad keempat. Gereja terus berkembang, terutama pada masa reformasi protestan abad ke-16, yang membawa perubahan besar dalam hubungan antara gereja dan negara. Beberapa wilayah mulai menerapkan pemisahan antara kekuasaan gereja dan negara, yang kemudian membentuk dasar bagi pemikiran sekuler modern. Pemisahan ini mengarah pada pendekatan baru terhadap peran gereja, yang kini lebih fokus pada moralitas dan pendidikan spiritual masyarakat, dibandingkan dengan keterlibatan langsung dalam urusan pemerintahan.

Dengan munculnya konsep sekularisme dan pluralisme agama di era modern, hubungan antara gereja dan negara terus berkembang. Peran gereja dalam pemerintahan menghadapi banyak tantangan, terutama karena banyak negara mulai mengadopsi prinsip sekuler yang memisahkan urusan agama dari politik. Gereja tidak lagi terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan publik, namun masih mempertahankan kekuatan moral dan sosial di beberapa wilayah. Gereja kini lebih fokus pada pendidikan, pelayanan kemasyarakatan, serta pembentukan moral dan nilai spiritual. Meskipun demikian, gereja tetap memainkan peran penting dalam diskusi mengenai masalah sosial dan moral di banyak tempat. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan heterogen, gereja berfungsi sebagai suara moral yang berusaha membimbing masyarakat dengan ajaran dan nilai-nilai spiritualnya. Sejak awal perkembangannya, gereja memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan sosial. Pada masa kekaisaran romawi, gereja yang awalnya mengalami penganiayaan akhirnya diterima dan diakui secara resmi setelah kaisar konstantinus memeluk agama kristen pada abad ke-4 masehi, menandai titik balik penting dalam hubungan erat antara gereja dan negara. Pada abad pertengahan, gereja, khususnya gereja katolik roma, menjadi salah satu kekuatan politik terkuat di eropa. Para paus memiliki wewenang besar dalam mengatur menimbulkan interaksi yang unik antara kekuasaan rohani dan kekuasaan duniawi. Namun, di sisi lain, keterlibatan gereja dalam pemerintahan juga membawa tantangan dan kontroversi, seperti konflik antara otoritas gerejawi dan kerajaan, serta munculnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam gereja itu sendiri.

Sejarah agama kristen menunjukkan bahwa peran gereja dalam pemerintahan telah mengalami perubahan yang kompleks dan dinamis (Hilmy, 2024). Gereja sejak awal memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan sosial. Setelah mengalami penganiayaan, gereja secara perlahan diterima dan akhirnya diakui secara resmi oleh kekaisaran romawi setelah kaisar konstantinus memeluk agama kristen pada abad ke-4 masehi. Momen ini menandai dimulainya hubungan erat antara gereja dan negara.

Pada abad pertengahan, gereja, khususnya gereja katolik roma, menjadi salah satu kekuatan politik paling dominan di eropa. Para paus memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengendalikan kerajaan dan memengaruhi kebijakan negara. Dalam situasi ini, kekuasaan rohani dan duniawi saling berinteraksi dengan cara yang unik. Namun, keterlibatan gereja dalam urusan pemerintahan juga menimbulkan masalah dan kontroversi, seperti konflik antara kerajaan dan gereja serta penyalahgunaan kekuasaan di dalam gereja itu sendiri.

Pada masa reformasi, martin luther dan reformator lainnya mulai mempertanyakan peran gereja dalam pemerintahan dan mengkritik keterlibatan gereja dalam politik. Munculnya gereja protestan dan pandangan yang lebih terpisah antara gereja dan negara merupakan dampak signifikan dari reformasi tersebut. Pemisahan ini semakin jelas di era modern, ketika banyak negara mengadopsi sekularisme, bahkan di negara-negara yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh agama kristen. Hingga saat ini, peran gereja dalam masyarakat dan politik tetap relevan. Gereja di banyak negara terus berfungsi sebagai suara moral, sosial, dan kemanusiaan, berkontribusi dalam membentuk pandangan dan kebijakan terkait isu-isu sosial.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki makna yang mendasari fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia, dengan fokus pada pemahaman yang mendalam dan interpretasi subjektif (Nartin , 2024). Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami "bagaimana" dan "mengapa" suatu kejadian terjadi, bukan sekadar "berapa banyak" atau "seberapa sering" sesuatu terjadi, seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan biasanya bersifat deskriptif dan tekstual, seperti kata-kata, pengalaman, narasi, atau simbol-simbol yang mencerminkan pandangan dan perasaan individu atau kelompok.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pada Masa Kekaisaran Romawi, Gereja Mengalami Perubahan Besar**

Pada masa kekaisaran romawi, gereja mengalami perubahan signifikan dalam peran dan pengaruh politiknya. Awalnya, gereja berada dalam posisi tertekan di bawah penganiayaan pemerintah romawi, yang menganggap kekristenan sebagai ancaman terhadap agama-agama tradisional dan stabilitas kekaisaran. Tujuan utama gereja pada masa itu adalah untuk bertahan hidup, mempertahankan iman, dan memperjuangkan kebebasan beragama. namun, keadaan berubah drastis setelah kaisar konstantinus mengeluarkan edik milan pada tahun 313 m, yang menjamin kebebasan beragama di seluruh kekaisaran, termasuk bagi umat kristen. Perubahan

ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan mengurangi konflik antar kelompok agama. Konstantinus memandang dukungan terhadap agama kristen yang terus berkembang, meskipun mengalami penganiayaan, sebagai cara untuk memperkuat dan menyatukan kekaisaran. Gereja, yang semula terpinggirkan, kini dipandang sebagai sekutu potensial bagi kekuasaan romawi.

Pada masa kekaisaran romawi, gereja mengalami perubahan signifikan dalam peran dan pengaruh politiknya. Awalnya, gereja berada dalam posisi tertekan di bawah penganiayaan pemerintah romawi, yang menganggap kekristenan sebagai ancaman terhadap agama-agama tradisional dan stabilitas kekaisaran. Tujuan utama gereja pada masa itu adalah untuk bertahan hidup, mempertahankan iman, dan memperjuangkan kebebasan beragama. Namun, keadaan berubah drastis setelah kaisar konstantinus mengeluarkan edik milan pada tahun 313 m, yang menjamin kebebasan beragama di seluruh kekaisaran, termasuk bagi umat kristen. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan mengurangi konflik antar kelompok agama. Konstantinus memandang dukungan terhadap agama kristen yang terus berkembang, meskipun mengalami penganiayaan, sebagai cara untuk memperkuat dan menyatukan kekaisaran. Gereja, yang semula terpinggirkan, kini dipandang sebagai sekutu potensial bagi kekuasaan romawi.

### **Gereja Sebagai Sumber Kekuatan Dan Legitimasi Bagi Para Penguasa Abad Pertengahan**

Selama abad pertengahan, gereja memainkan peran yang sangat penting sebagai sumber kekuatan dan legitimasi bagi para penguasa. Pada periode ini, hubungan antara gereja dan negara sangat erat, di mana gereja dianggap memiliki otoritas moral dan spiritual yang besar, yang memberikan dasar bagi pemerintahan. Para penguasa bergantung pada gereja bukan hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai sumber yang memberikan legitimasi bagi kekuasaan mereka, karena gereja dipercaya memiliki mandat ilahi yang mengesahkan pemerintahan mereka. Tetapi gereja menjadi sumber otoritas yang dihormati di seluruh eropa, dan persetujuan gereja sangat penting bagi kestabilan serta kelangsungan pemerintahan. Banyak raja dan penguasa yang menganggap bahwa restu atau pengurapan dari gereja, melalui ritual seperti penobatan, merupakan pemberian kuasa langsung dari tuhan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa raja adalah penguasa yang diangkat oleh tuhan, sesuai dengan konsep hak ilahi raja.

Gereja menyediakan dasar teologis dan ideologis untuk klaim kekuasaan para penguasa, membuat rakyat percaya bahwa ketaatan kepada raja adalah bagian dari ketaatan kepada tuhan. selain itu, gereja memberikan bimbingan moral dan etis kepada para penguasa,

serta menjadikan nilai-nilai kristen sebagai panduan dalam pembuatan kebijakan. Gereja mengajarkan bahwa seorang penguasa yang baik harus memerintah dengan adil, menghindari korupsi, dan melindungi rakyatnya (Rahadian, 2024). Gereja berusaha memastikan bahwa kekuasaan yang dipegang para penguasa tidak disalahgunakan, dan masyarakat mendapat perlindungan serta keadilan. Para pemimpin gereja seperti paus, uskup, dan biarawan terkemuka sering memberikan nasihat kepada raja, dan ini meningkatkan pengaruh gereja dalam keputusan-keputusan politik. Sebagai sumber legitimasi, gereja juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan posisinya yang melintasi batas-batas politik, gereja berfungsi sebagai mediator dalam berbagai konflik dan turut berpartisipasi dalam mengelola wilayah dan sumber daya. Gereja memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan, memiliki lahan yang luas, dan mengumpulkan pajak dari jemaat. Kekayaan ini memungkinkan gereja memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan ekonomi dan politik. Para penguasa yang mendapatkan dukungan finansial dan militer dari gereja sering kali memiliki keuntungan dalam menjaga kekuasaan mereka.

Peran gereja dalam memberikan legitimasi bagi penguasa pada abad pertengahan tidak hanya terbatas pada ranah politik dan sosial, tetapi juga sangat memengaruhi bidang budaya dan pendidikan. Gereja bertindak sebagai penjaga kebudayaan dan pengetahuan pada masa tersebut. Sebagai lembaga yang terstruktur dengan sistem pendidikan yang mapan, gereja mendominasi sektor pendidikan di eropa. Banyak biara dan gereja yang memiliki perpustakaan dan menjadi pusat pembelajaran, tempat di mana karya-karya intelektual serta literatur klasik diterjemahkan dan disebar. Oleh karena itu, para penguasa sering kali bergantung pada gereja untuk mendidik anak-anak mereka dan memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai kristen.

### **Pengaruh Gereja Dalam Kehidupan Sosial Dan Hukum Pada Abad Pertengahan**

Pengaruh gereja dalam kehidupan sosial dan hukum pada abad pertengahan sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Gereja katolik roma tidak hanya berfungsi sebagai institusi keagamaan yang mengatur ibadah dan moralitas, tetapi juga sebagai kekuatan utama dalam sistem sosial dan hukum, memengaruhi berbagai hal, mulai dari hukum keluarga hingga hukum pidana dan etika sosial (afifah , 2020). Salah satu aspek penting dari pengaruh gereja adalah bahwa hukum gereja atau "kanon" menjadi sumber utama peraturan hukum di banyak negara eropa. Hukum kanon ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pernikahan, perceraian, wasiat, dan pelanggaran moral. Sebagai contoh, gereja menetapkan pernikahan sebagai sakramen yang suci, yang tidak dapat dibatalkan kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan oleh gereja. Gereja memainkan peran dalam memvalidasi

pernikahan, mencatat silsilah keluarga, dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan hak-hak keluarga, menjadikannya lembaga yang dihormati dan dipercaya dalam urusan kehidupan pribadi dan keluarga.

Dalam hal hukum pidana, gereja juga memiliki pengaruh besar. Gereja mengajarkan nilai-nilai moral yang harus dihormati oleh masyarakat, seperti kejujuran, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap sesama. Banyak hukum yang diterapkan pada abad pertengahan didasarkan pada prinsip-prinsip moral kristen. Sebagai contoh, gereja menetapkan hukuman bagi tindakan yang dianggap sebagai dosa, seperti pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan penistaan. Para imam, uskup, dan pejabat gereja lainnya memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang melakukan pelanggaran moral atau agama, dan mereka dapat memberikan hukuman, seperti pengakuan dosa secara publik atau penebusan dosa, sebagai cara untuk memperbaiki pelanggaran tersebut.

Selain itu, gereja juga berperan dalam menjaga kesejahteraan sosial melalui pengelolaan amal dan pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Biara-biara dan lembaga-lembaga gereja sering kali menyediakan dukungan untuk orang miskin, tempat perlindungan bagi pengungsi atau orang sakit, serta rumah sakit untuk mereka yang memerlukan perawatan. Layanan sosial ini tidak hanya membantu mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan, tetapi juga memperkuat peran gereja sebagai pusat kehidupan sosial yang memiliki wewenang moral (Soetoprawiro, 2003). Dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, gereja membangun hubungan yang erat dengan masyarakat dan memperkuat posisinya sebagai institusi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.

Gereja juga memainkan peran penting dalam pendidikan, yang pada masa itu hampir sepenuhnya dikelola oleh institusi keagamaan. Lembaga-lembaga gereja menjadi pusat pembelajaran utama di eropa, dengan banyak orang terpelajar, termasuk cendekiawan dan filsuf, berasal dari kalangan gereja. Gereja bertanggung jawab dalam menyebarkan pengetahuan agama dan nilai-nilai moral, serta melestarikan dan menerjemahkan teks-teks klasik serta karya-karya filsuf yunani dan romawi. Gereja menyusun kurikulum pendidikan yang berlandaskan ajaran agama, mencakup pelajaran bahasa latin, logika, dan retorika. Pendidikan ini tidak hanya mempersiapkan generasi baru para imam dan Pemimpin Masyarakat, Tetapi Juga Para Intelektual Yang Memiliki Pemahaman Mendalam Mengenai Ajaran Kristen, Sekaligus Memperkuat Pengaruh Gereja Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat.

Pengaruh gereja dalam kehidupan sosial dan hukum pada abad pertengahan mencerminkan kekuatan moral, politik, dan intelektualnya yang sangat besar. Melalui pengajaran nilai-nilai kristen, penegakan hukum moral, penyediaan bantuan sosial, dan pengelolaan pendidikan, gereja berhasil menanamkan pengaruh yang mendalam di kalangan masyarakat. Pengaruh ini berperan penting dalam membentuk sistem nilai, norma sosial, dan sistem hukum yang bertahan selama berabad-abad, dan yang hingga kini menjadi dasar bagi banyak aspek kehidupan modern.

### **Reformasi Protestan Dan Perubahan Hubungan Gereja Dengan Pemerintahan**

Reformasi protestan yang dimulai pada abad ke-16 membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara gereja dan pemerintahan. Tujuan utama gerakan ini adalah membebaskan gereja dari praktik-praktik yang dianggap korup dan tidak sesuai dengan ajaran asli kristen, serta mengembalikan kemurnian iman yang berlandaskan pada alkitab. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek spiritual dan teologis, tetapi juga mengubah cara gereja berinteraksi dengan otoritas negara dan memperbarui peran serta wewenangnya dalam masyarakat. Salah satu tujuan utama reformasi adalah memisahkan otoritas gereja dari kekuasaan politik dan mengurangi pengaruh dominan gereja katolik roma dalam urusan pemerintahan (De Gruchy, 2003). Para reformator seperti martin luther, john calvin, dan huldrych zwingli berpendapat bahwa gereja seharusnya lebih fokus pada tugas rohaninya, tanpa terikat pada kepentingan politik atau kekuasaan. Dengan demikian, mereka berharap otoritas agama dan politik dapat berdiri secara independen, di mana negara mengelola urusan pemerintahan tanpa campur tangan gereja, sementara gereja fokus pada penyebaran ajaran dan praktik agama.

Reformasi protestan juga mendorong perkembangan bentuk pemerintahan yang lebih desentralistik, yang tercermin dalam kemunculan gereja-gereja lokal yang independen. Gereja-gereja protestan, yang sering kali terpisah dari struktur hierarkis gereja katolik, memberikan otonomi kepada pemimpin lokal dan masyarakat untuk mengatur kehidupan beragama mereka sendiri. Hal ini berdampak pada pembentukan model pemerintahan baru di banyak negara eropa, di mana otoritas politik tidak lagi harus tunduk pada gereja pusat. Di negara-negara seperti jerman, inggris, dan belanda, gereja protestan mendukung gagasan bahwa setiap individu berhak menentukan keyakinan Pribadinya Tanpa Tekanan Dari Negara Atau Gereja. Dengan Demikian, Reformasi Berkontribusi Pada Lahirnya Ide-Ide Modern Tentang Kebebasan Beragama Dan Otonomi Individu.

Selain itu, reformasi juga memicu perubahan besar dalam sistem hukum dan etika masyarakat. Sebelumnya, hukum di banyak tempat didasarkan pada otoritas gereja, yang

memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan sosial dan moral. Namun, setelah reformasi, banyak pemerintah mulai mengembangkan sistem hukum yang lebih sekuler, yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang tidak terikat langsung pada gereja. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menciptakan hukum yang lebih universal dan adil bagi semua warga negara, tanpa memandang perbedaan keyakinan agama.

### **Pemisahan Kekuasaan Gereja Dan Negara Di Era Modern Dan Sekularisasi**

Pemisahan kekuasaan gereja dan negara, serta fenomena sekularisasi, adalah dua faktor utama yang memengaruhi hubungan antara agama dan politik di era modern. Perubahan ini tidak hanya mengubah struktur sosial dan politik di berbagai negara, tetapi juga membawa tantangan serta peluang baru bagi gereja dalam melaksanakan misinya. Dalam dunia yang semakin memisahkan urusan agama dari urusan negara, gereja harus menyesuaikan diri dengan peran yang lebih terbatas dalam ranah publik, namun tetap berusaha untuk mempertahankan relevansi dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat (Suryajaya, 2022).

Pada awalnya, gereja dan negara di berbagai belahan dunia memiliki hubungan yang sangat erat. Di eropa abad pertengahan, gereja katolik roma memegang kekuasaan yang sangat dominan, baik dalam aspek spiritual maupun politik. Dalam banyak situasi, otoritas gereja bahkan sering kali lebih kuat daripada otoritas kerajaan atau negara. Namun, dengan berkembangnya pemikiran rasionalisme, pencerahan (enlightenment), dan gerakan-gerakan reformasi, hubungan tersebut mulai mengalami perubahan signifikan. Salah satu hasil utama dari perkembangan ini adalah pemisahan kekuasaan antara gereja dan negara, yang kini menjadi ciri khas di banyak negara modern.

Pemisahan kekuasaan ini tidak hanya berhubungan dengan pembentukan kebijakan politik yang lebih sekuler, tetapi juga dengan penegasan bahwa gereja tidak boleh memaksakan ajaran atau doktrinnya dalam urusan pemerintahan, begitu pula sebaliknya. Negara, yang sebelumnya sering kali berada di bawah pengaruh otoritas gereja, mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih rasional dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum sekuler (Rahman, 2020). Dalam kerangka ini, negara Diharapkan Untuk Menghormati Kebebasan Beragama Dan Memberikan Ruang Bagi Keberagaman Agama Tanpa Adanya Intervensi Langsung Dari Gereja Atau Lembaga Keagamaan Lainnya.

Proses sekularisasi, yang berkaitan erat dengan pemisahan ini, menggambarkan penurunan pengaruh agama dalam kehidupan publik, baik dalam hal pemerintahan, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Fenomena sekularisasi mencerminkan pergeseran nilai-nilai dan prioritas dalam masyarakat modern. Ketika masyarakat bergerak menuju pemikiran ilmiah, rasional, dan berbasis bukti, ruang bagi agama untuk berperan dominan dalam aspek-aspek

kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Dalam banyak negara barat, misalnya, gereja mulai kehilangan pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan publik, dan nilai-nilai agama sering kali dipandang sebagai hal yang lebih bersifat pribadi dan tidak terkait dengan pemerintahan atau urusan sosial. Sekularisasi tidak berarti bahwa agama sepenuhnya menghilang dari kehidupan masyarakat. Beberapa gereja dan kelompok agama berusaha menanggapi perubahan ini dengan lebih menyesuaikan diri dengan kondisi zaman, misalnya melalui partisipasi dalam isu-isu sosial atau dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang dapat diterima oleh masyarakat yang lebih pluralistik. Gereja-gereja di negara-negara sekuler tetap berperan dalam kehidupan sosial dan memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetapi pemisahan gereja dan negara ini sering kali menimbulkan tantangan bagi gereja dalam mempertahankan relevansinya. Gereja harus menemukan cara untuk menyampaikan pesan injil dan melibatkan diri dalam isu-isu sosial tanpa campur tangan negara atau tanpa memaksakan nilai-nilai agama dalam konteks yang lebih luas. Hal ini menuntut gereja untuk lebih fokus pada pengaruh moral dan spiritual, serta untuk menjadi agen perubahan yang berbasis pada kasih dan keadilan, tanpa terlalu bergantung pada kekuasaan politik atau status sosial.

Pemisahan antara gereja dan negara serta fenomena sekularisasi memang memberikan dampak yang signifikan terhadap posisi gereja dalam kehidupan sosial dan politik. Meskipun gereja tidak lagi memegang kendali langsung atas kebijakan negara, gereja tetap memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang memengaruhi masyarakat.

Salah satu dampak positif dari pemisahan ini adalah terciptanya kebebasan beragama yang lebih luas. Dalam sistem negara sekuler, individu tidak lagi diwajibkan untuk mengikuti ajaran agama tertentu atau terikat pada aturan gereja dalam urusan politik. Sebaliknya, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap keberagaman agama dan dapat mempraktikkan kepercayaan mereka tanpa takut akan penindasan negara atau kelompok agama tertentu. Hal ini menciptakan ruang untuk pluralisme agama yang lebih inklusif, di mana gereja-gereja dan kelompok agama lainnya dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa harus terikat oleh otoritas politik yang dominan (mun'im a, 2003). Namun, meskipun ada kebebasan beragama yang lebih besar, pemisahan ini juga membawa tantangan bagi gereja dalam menjaga relevansinya di masyarakat modern. Ketika agama semakin terpisah dari struktur kekuasaan negara, gereja perlu menemukan cara-cara baru untuk berinteraksi dengan masyarakat yang semakin sekuler. Salah satu cara gereja merespons tantangan ini adalah dengan lebih fokus pada peran sosialnya, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Banyak gereja modern yang mengarahkan upayanya untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan serta membangun komunitas yang peduli terhadap sesama.

Salah satu dampak positif dari pemisahan ini adalah terciptanya kebebasan beragama yang lebih luas. Dalam sistem negara sekuler, individu tidak lagi diwajibkan untuk mengikuti ajaran agama tertentu atau terikat pada aturan gereja dalam urusan politik. Sebaliknya, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap keberagaman agama dan dapat mempraktikkan kepercayaan mereka tanpa takut akan penindasan negara atau kelompok agama tertentu. Hal ini menciptakan ruang untuk pluralisme agama yang lebih inklusif, di mana gereja-gereja dan kelompok agama lainnya dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa harus terikat oleh otoritas politik yang dominan (Mun'im A, 2003).

Namun, meskipun ada kebebasan beragama yang lebih besar, pemisahan ini juga membawa tantangan bagi gereja dalam menjaga relevansinya di masyarakat modern. Ketika agama semakin terpisah dari struktur kekuasaan negara, gereja perlu menemukan cara-cara baru untuk berinteraksi dengan masyarakat yang semakin sekuler. Salah satu cara gereja merespons tantangan ini adalah dengan lebih fokus pada peran sosialnya, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Banyak gereja modern yang mengarahkan upayanya untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan serta membangun komunitas yang peduli terhadap sesama. Gereja juga berperan dalam menjaga dialog antarumat beragama dan mengadvokasi keadilan sosial serta hak asasi manusia. Meskipun gereja tidak lagi dapat memaksakan ajaran agamanya dalam urusan politik, pengaruh moralnya tetap kuat. Gereja sering kali memanfaatkan pengaruh ini untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak adil, seperti kebijakan yang menindas kaum miskin atau kebijakan yang merusak lingkungan. Dengan suara moralnya, gereja berusaha menjadi agen perubahan yang memperjuangkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat.

Sekularisasi ini juga membawa dampak terhadap cara gereja menyampaikan ajarannya. Dalam masyarakat yang semakin rasional dan ilmiah, gereja harus menemukan cara untuk berbicara kepada umat dengan pendekatan yang relevan. Banyak gereja kini menyadari pentingnya menghubungkan ajaran agama dengan isu-isu sosial kontemporer, seperti perubahan iklim, ketidakadilan ekonomi, dan hak asasi manusia. Gereja berupaya agar ajarannya tetap relevan di dunia modern yang penuh tantangan ini, dengan menekankan pentingnya cinta kasih, keadilan sosial, dan solidaritas umat manusia. Tantangan terbesar bagi gereja adalah tetap menjaga identitas dan integritas ajarannya tanpa terjebak dalam politik praktis atau kehilangan esensi iman kristen. Gereja harus mampu beradaptasi dengan zaman

tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar iman, seperti kasih kepada sesama, pengampunan, dan pelayanan kepada yang terpinggirkan. Dalam dunia yang semakin pluralistik dan sekuler, gereja diharapkan tetap menjadi saksi bagi kebenaran dan kasih kristus, sambil terus memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan umat manusia.

### **Gereja Sebagai Suara Etis Dan Moral Di Era Globalisasi Dan Isu Sosial Kontemporer**

Di era globalisasi yang serba cepat dan kompleks ini, gereja menghadapi tantangan dalam mempertahankan perannya sebagai suara etis dan moral di tengah arus informasi yang tak terbendung serta dinamika sosial yang terus berubah. Dalam konteks dunia yang semakin terhubung, di mana isu-isu sosial, ekonomi, dan politik saling berjaln, gereja memiliki peluang untuk memberikan panduan moral yang relevan dan jelas bagi umat manusia dalam menghadapi berbagai tantangan. Di tengah masyarakat yang pluralistik dan sering kali terjebak dalam materialisme serta individualisme, gereja dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang menyuarakan nilai-nilai kasih, keadilan, dan perdamaian sesuai dengan ajaran kristus (Majid, 2024).

salah satu alasan gereja tetap relevan adalah kemampuannya untuk mengangkat keprihatinan terhadap isu-isu sosial masa kini, seperti kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, perubahan iklim, dan pelanggaran hak asasi manusia. Gereja tidak hanya berbicara mengenai kebaikan rohani, tetapi juga tentang penerapan kasih kristus melalui tindakan nyata. Di banyak negara, gereja berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin, membantu pengungsi dan korban konflik, serta mendukung kebijakan yang lebih adil dan ramah lingkungan. Dengan cara ini, gereja menunjukkan bahwa iman kristen melampaui ibadah, dan harus tercermin dalam cara umat memperlakukan sesama serta menjaga bumi yang dipercayakan kepada mereka.

Gereja juga berfungsi sebagai suara moral yang mempertanyakan nilai-nilai dominan dalam masyarakat global. Di tengah dunia yang semakin materialistik dan sekuler, gereja mengingatkan pentingnya kesederhanaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap yang terpinggirkan. Di tengah arus konsumerisme dan fokus pada kepentingan pribadi, gereja menekankan nilai-nilai abadi, seperti kasih tanpa syarat, pengorbanan, dan keadilan. Suara gereja mengingatkan umat akan bahaya dari pola pikir yang hanya mementingkan keuntungan atau kekuasaan pribadi, yang dapat mengarah pada ketidakadilan dan ketimpangan sosial.

Selain itu, gereja memiliki peran penting dalam meredakan polarisasi dan konflik yang sering timbul dalam masyarakat yang semakin beragam. Di tengah perbedaan budaya, agama, dan ideologi, gereja berfungsi sebagai mediator yang mendorong dialog, rekonsiliasi, dan toleransi. Dengan menekankan prinsip kasih dan harapan, gereja dapat menjadi ruang untuk

mempromosikan perdamaian dan persatuan gereja juga berperan dalam menjaga martabat manusia dan memperjuangkan persatuan di tengah keberagaman. Gereja sebagai suara moral menghadapi tantangan baru yang muncul dari perkembangan teknologi, seperti dampak negatif media sosial dan penyebaran informasi palsu. Gereja perlu memberikan panduan etis tentang cara umat berinteraksi di dunia maya, serta menjaga nilai kebenaran dan keadilan di tengah derasnya arus informasi yang sering membingungkan atau merugikan. Melalui ajarannya, gereja dapat mengedepankan pentingnya kebijaksanaan dan etika dalam penggunaan teknologi, serta mendorong integritas di dunia digital yang penuh godaan. Sebagai suara etis di era globalisasi, gereja memainkan peran penting dalam memberikan arahan dan prinsip bagi umat manusia untuk menghadapi berbagai tantangan sosial dan moral. Dengan berpegang pada ajaran kristus, gereja memiliki kesempatan besar untuk memberi dampak positif, baik dalam kehidupan umatnya maupun di masyarakat luas.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan mengenai peran gereja dalam pemerintahan sepanjang sejarah kekristenan mengungkapkan bahwa gereja telah memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial, moral, dan politik, terutama di dunia barat. Pada periode awal kekristenan, gereja tidak hanya berperan sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan dominan dalam aspek sosial, hukum, dan politik. Pada abad pertengahan eropa, gereja memegang kendali besar melalui hukum kanon dan memberikan legitimasi moral serta politik bagi kekuasaan penguasa.

Namun, dengan munculnya reformasi protestan pada abad ke-16, peran gereja dalam pemerintahan mengalami perubahan signifikan. Reformasi mendorong pemisahan antara gereja dan negara, yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan pemerintahan sekuler dan sistem demokrasi modern. Meskipun pengaruh gereja dalam pemerintahan formal menurun, gereja tetap memiliki peran sebagai suara moral dalam isu-isu sosial, keadilan, dan hak asasi manusia. Pada era modern, gereja telah bertransformasi dari kekuatan politik dan hukum menjadi pengaruh moral dan sosial yang lebih inklusif, terutama dalam masyarakat yang semakin sekuler.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Afifah, F., & Luthfy, R. M. (2024). PEMIKIRAN NEGARA PADA MASA ABAD PERTENGAHAN. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 129-141.
- Afifah, F., & Luthfy, R. M. (2024). PEMIKIRAN NEGARA PADA MASA ABAD PERTENGAHAN. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 129-141.
- De Gruchy, J. W. (2003). *Agama Kristen Dan Demokrasi*. BPK Gunung Mulia.
- Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, S. (2011). *Teologi kerukunan*. Kencana.
- Hilmy, A. L., & Respati, Y. A. (2024). Evolusi Konstruksi Agama di Indonesia: Sinkretisme dan Koeksistensi dalam Lanskap Keagamaan: Integrasi Tradisi Lokal, Pengaruh Kolonial, dan Modernisasi. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 3(1), 75-86.
- Indrajaya, A., & Widiyanto, A. (2024). Teladan Kepemimpinan Yesus Kristus dalam Narasi Injil Markus dan Sumbangannya Bagi Kepemimpinan Secara Umum dan dalam Gereja. *TEOLOGIS-RELEVAN-APLIKATIF-CENDIKIA-KONTEKSTUAL*, 3(2), 90-118.
- Karsono, P. D. (2022). Kepemimpinan Dinamis Dalam Institusi Gereja. *Kaluteros Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 4(2), 47-66.
- Kasmuri, K. (2014). Fenomena Sekularisme.
- Majid, N. K. (2024). Pancasila sebagai Landasan Etika Politik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. *Action Research Literate*, 8(3), 509-516.
- Maulana, I. B., & SH, L. M. (2020). *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. Citra Aditya Bakti.
- Mun'im A, S. (2003). *Membendung militansi agama: iman dan politik dalam masyarakat modern*. Penerbit Erlangga.
- Mun'im A, S. (2003). *Membendung militansi agama: iman dan politik dalam masyarakat modern*. Penerbit Erlangga.
- Mun'im A, S. (2003). *Membendung militansi agama: iman dan politik dalam masyarakat modern*. Penerbit Erlangga.
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., MM, C., Santoso, Y. H., ... & Eliyah, S. K. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.

- Panggabean, S. R., & Ali-Fauzi, I. (2011). *Merawat Kebersamaan: Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian*. Centre for the Study of Islam and Democracy
- Rahadian, S., & Fallderama, F. (2020). Sikap Kritis terhadap Kekuasaan dalam Tradisi Calvinist: Sebuah Kajian Historis-Teologis Tentang Kekritisn Gereja terhadap Pemerintah untuk Mewujudkan Regnum Christi: Critical Attitude Toward The State In Calvinist Tradition: A Historical Discourse About Church Criticism To The Goverment To Build Regnum Christi. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 7(2), 219-244.
- Rahman, M. T. (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sen, A. Beberapa Tantangan Global. *Omnia in Caritate*, 127. Suyanto, I. J., Taruno, B. S., Harum, H., Prasetianto, A. Y., & Vinsensius Felisianus Kama, O. (2021). *KATOLISITAS Pendidikan Agama Katolik*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Seran, A. (2024). Relevansi Nilai-Nilai Etika Kristiani Dalam Kehidupan Masyarakat Global. *Jurnal Magistra*, 2(2), 250-264.
- Soehadha, M. (2021). Menuju Sosiologi Beragama: Paradigma Keilmuan dan Tantangan Kontemporer Kajian Sosiologi Agama di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 1-20.
- Soetoprawiro, K. (2003). *Bukan kapitalisme bukan sosialisme: memahami keterlibatan sosial gereja*. PT Kanisius.
- Sudarminta, J. (2013). *Etika umum: Kajian tentang beberapa masalah pokok dan teori etika normatif*. PT Kanisius.
- Suryajaya, M. (2022). Asal-Usul Pemikiran Tentang Sekularisme Di Abad Pertengahan. *Jurnal Filsafat*, 32(1), 1-31.
- Syafii, H. (2024). *KAMMI: Reconstructing the Epicenter of Current Movement*. Gaza Library Publishing.
- Wahyuni, D. (2021). Melampaui Sekularisasi: Meninjau Ulang Peran Agama di Ruang Publik pada Era Disrupsi. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 87-98.